

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 🕿 (0752). 84506 Padang Panjang 27118 Email: inspektoratpadangpanjang@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023

OPD : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN

DAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 700/52/ITDA-PP/V-2024

TANGGAL: 17 MEI 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 🕿 (0752). 84506 Padang Panjang 27118 Email:itkopadangpanjang@gmail.com

Nomor

: 700/52/Itda-PP/V-2024

Padang Panjang, 14 Mei 2024

Lampiran

Perihal

: Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang

di

Padang Panjang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, tujuan evaluasi AKIP adalah:

- a. memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan dokumen dan informasi yang disampaikan kepada Tim Evaluator, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

a. Mempublikasikan Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja pada website resmi Pemerintah Daerah yakni <u>www.padangpanjang.go.id</u> dan website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia <u>www.esr.menpan.go.id</u>.

b. Telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan kinerja

c. Telah membuat dokumen yang menggambarkan hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang memperoleh nilai 71.75 atau predikat BB. Penilaian ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22.20
2.	Pengukuran Kinerja	30	19.80
3.	Pelaporan Kinerja	15	11.25
4.	Evaluasi Internal	25	18.50
•	Nilai Hasil Evaluasi	100	71.75
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang Tahun 2023 sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, telah memiliki dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan,

Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja secara berjenjang. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam Perencanaan Kinerja diantaranya sebagai berikut:

- 1. Tujuan, indikator kinerja tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target belum dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja.
- 2. Target kinerja pada Renstra berbeda dengan Perjanjiaan Kinerja.
- 3. Rencana aksi belum dipantau capaiannya secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

Pemantauan pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pengukuran Kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja masih berorientasi pada penyerapan anggaran dan fisik, sedangkan pengukuran kinerja setiap level jabatan belum dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga belum diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
- Target kinerja triwulanan setiap level jabatan belum ditetapkan sehingga belum dapat diukur capaiannya secara berkala.
- 3. Pengukuran kinerja yang telah dilakukan belum mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 4. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar pemberian reward and punishment kepada pegawai

C. Pelaporan Kinerja

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja dan telah direviu oleh Inspektorat Kota Padang Panjang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Inspektorat Kota Padang Panjang telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal namum masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni belum seluruh rekomendasi tahun sebelumnya ditindaklanjuti diantaranya:

- 1. Tujuan, indikator kinerja tujuan, Sasaran, indikator kinerja sasaran dan target belum dicantumkan dalam dokumen Rencana Kerja.
- 2. Target kinerja pada Renstra berbeda dengan Perjanjiaan Kinerja.
- 3. Rencana aksi belum dipantau capaiannya secara berkala.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian diatas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Perencanaan Kinerja.

- Mencantumkan Tujuan, indikator kinerja tujuan, Sasaran indikator kinerja sasaran dan target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja.
- 2. Menyelaraskan target kinerja antara Renstra dengan Perjanjiaan Kinerja.
- 3. Melakukan pemantauan capaian rencana aksi secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja

- 1. Melakukan pemantauan capaian kinerja setiap level jabatan sehingga diketahui tingkat ketercapaiannya secara berkala.
- 2. Mencantumkan target kinerja triwulanan setiap level jabatan sehingga dapat diukur capaiannya secara berkala.
- 3. Melakukan penyesuaian strategi, kebijakan dan aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 4. Menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment.

C. Pelaporan Kinerja

Selalu mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan kinerja.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang Panjang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja sebagai penerapan manajemen pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen berbasis kinerja di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi.

Pembina Utama Muda/NIP. 197004051997031004